

Analisis dampak korupsi terhadap pembangunan ekonomi di Indonesia

Anya Amelya Febriyantie

Program Studi Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: amelyaanya7@gmail.com

Kata Kunci:

Korupsi; pembangunan ekonomi; pertumbuhan ekonomi; tata kelola pemerintahan; indeks persepsi korupsi

Keywords:

Corruption; economic development; economic growth; government governance; corruption perception index

ABSTRAK

Korupsi merupakan salah satu tantangan struktural terbesar yang menghambat kemajuan ekonomi Indonesia. Penelitian ini bertujuan menganalisis secara mendalam dampak korupsi terhadap pembangunan ekonomi Indonesia dari berbagai dimensi, meliputi pertumbuhan ekonomi, investasi asing, kesenjangan sosial, kualitas layanan publik, dan stabilitas sistem perbankan. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif berbasis kajian literatur, penelitian ini menelaah berbagai sumber ilmiah, laporan lembaga internasional seperti Transparency International dan World Bank, serta data statistik dari Badan Pusat Statistik (BPS). Hasil kajian menunjukkan bahwa tingkat korupsi yang tinggi terbukti secara konsisten menghambat pertumbuhan ekonomi nasional, menurunkan iklim investasi, memperburuk ketimpangan pendapatan, melemahkan kualitas infrastruktur dan layanan publik, serta mengancam stabilitas perbankan. Upaya pemberantasan korupsi yang komprehensif melalui penguatan lembaga pengawasan, transparansi anggaran, dan reformasi birokrasi menjadi kunci akselerasi pembangunan ekonomi Indonesia yang berkelanjutan.

ABSTRACT

Corruption is one of the greatest structural challenges hindering Indonesia's economic progress. This study aims to analyze in depth the impact of corruption on Indonesia's economic development from various dimensions, including economic growth, foreign investment, social inequality, the quality of public services, and the stability of the banking system. Using a descriptive qualitative approach based on a literature review, this research examines various scientific sources, reports from international institutions such as Transparency International and World Bank, as well as statistical data from Badan Pusat Statistik (BPS). The findings indicate that high levels of corruption consistently hinder national economic growth, reduce the investment climate, worsen income inequality, weaken the quality of infrastructure and public services, and threaten banking stability. Comprehensive anti-corruption efforts through strengthening supervisory institutions, budget transparency, and bureaucratic reform are key to accelerating sustainable economic development in Indonesia.

Pendahuluan

Korupsi telah menjadi permasalahan sistemik yang mengakar kuat dalam sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Fenomena ini tidak hanya merugikan keuangan negara secara langsung, tetapi juga menimbulkan dampak berlipat ganda terhadap seluruh aspek pembangunan nasional (Cintana et al., 2025).



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Laboratorium Ekonomi Universitas Gadjah Mada mencatat bahwa kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh korupsi di Indonesia mencapai Rp509,57 triliun, sebuah angka yang menggambarkan betapa masifnya dampak tindakan koruptif terhadap perekonomian negara (Politik, 2022). Indonesia Corruption Watch (ICW) melaporkan bahwa sepanjang tahun 2022 terdapat 612 kasus korupsi yang ditangani oleh aparat penegak hukum. Data ini menunjukkan betapa masifnya persoalan korupsi yang dihadapi Indonesia. Kondisi ini diperparah oleh skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia yang masih berada di angka 34 dari skala 100 pada tahun 2023 menurut Transparency International, menempatkan Indonesia pada peringkat 115 dari 180 negara yang disurvei (Alif & Hazmi, 2024). Skor ini mencerminkan masih tingginya persepsi publik terhadap praktik korupsi di sektor publik Indonesia.

Dampak korupsi terhadap pembangunan ekonomi bersifat multidimensional (Cintana et al., 2025). Pertama, korupsi secara langsung menggerus sumber daya fiskal negara yang seharusnya dialokasikan untuk program pembangunan. Kedua, korupsi menciptakan distorsi dalam mekanisme pasar sehingga menghambat masuknya investasi asing dan domestik yang berkualitas. Ketiga, korupsi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah menurunkan kualitas infrastruktur yang dibangun, sehingga mengurangi daya dukung pembangunan jangka panjang. Keempat, korupsi yang menjangkiti sektor pendidikan dan kesehatan menghambat pengembangan kualitas sumber daya manusia sebagai faktor produksi utama dalam ekonomi modern (Hasibuan et al., 2025). Berbagai penelitian telah mengkonfirmasi adanya hubungan negatif yang signifikan antara tingkat korupsi dengan laju pertumbuhan ekonomi (Alif & Hazmi, 2024). Penelitian (Hasibuan et al., 2025) yang mengevaluasi periode 2019-2024 menemukan bahwa korupsi yang tinggi berkontribusi pada ketidakstabilan ekonomi dan inflasi. Sementara itu, (Cintana et al., 2025) menegaskan bahwa korupsi memperburuk ketimpangan sosial dan melemahkan fondasi pembangunan berkelanjutan. Kajian-kajian ini memperkuat urgensi penelitian lebih mendalam mengenai dampak korupsi terhadap berbagai dimensi pembangunan ekonomi Indonesia. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif dampak korupsi terhadap pembangunan ekonomi Indonesia dengan menelaah berbagai dimensi yang saling terkait. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis sekaligus rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan dalam upaya akselerasi pembangunan ekonomi Indonesia yang inklusif dan berkelanjutan.

Tinjauan Pustaka

Definisi dan Tipologi Korupsi

Korupsi secara etimologis berasal dari bahasa Latin "corrumpere" yang berarti merusak, menyimpang, atau menghancurkan. Transparency International mendefinisikan korupsi sebagai penyalahgunaan kekuasaan yang dipercayakan untuk kepentingan pribadi. Definisi ini mencakup berbagai bentuk perilaku menyimpang mulai dari penyuapan (bribery), penggelapan (embezzlement), nepotisme, hingga kolusi dalam pengadaan barang dan jasa public (Azami, 2026). (Islam et al., n.d.) dalam penelitiannya mengidentifikasi bahwa korupsi dalam konteks perekonomian Indonesia tidak hanya berdampak pada stabilitas makroekonomi, tetapi juga memengaruhi stabilitas sistem perbankan nasional. Studi tersebut menemukan bahwa korupsi

berpengaruh positif terhadap risiko sistemik perbankan, artinya peningkatan intensitas korupsi berkorelasi dengan meningkatnya kerentanan sektor perbankan terhadap krisis. (Dipa, 2022) mengklasifikasikan korupsi berdasarkan pelaku dan modusnya: korupsi administratif yang melibatkan pejabat birokrasi dalam pelaksanaan kebijakan, state capture yang merupakan upaya kelompok kepentingan untuk memengaruhi perumusan regulasi demi kepentingan kelompok, serta grand corruption yang melibatkan pejabat tinggi pemerintahan dalam transaksi bernilai besar.

Teori Dampak Korupsi Terhadap Ekonomi

Terdapat dua aliran pemikiran utama mengenai dampak korupsi terhadap perekonomian. Aliran pertama, yang menjadi konsensus mainstream, berpandangan bahwa korupsi berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi melalui berbagai saluran transmisi, terutama melalui distorsi alokasi sumber daya dan penurunan efisiensi investasi (Alif & Hazmi, 2024). Aliran kedua, yang dikenal sebagai "greasing the wheels hypothesis," berpendapat bahwa dalam kondisi tertentu di mana birokrasi sangat kaku dan tidak efisien, korupsi justru dapat berfungsi sebagai pelumas yang meningkatkan efisiensi ekonomi dengan memperlancar transaksi bisnis. Namun, pandangan ini semakin banyak mendapat kritik karena mengabaikan dampak jangka panjang korupsi terhadap kualitas institusi dan ketidakadilan distribusi manfaat ekonomi. Dalam konteks Indonesia, sebagian besar penelitian empiris mendukung pandangan bahwa korupsi berdampak negatif terhadap pembangunan ekonomi. (Alif & Hazmi, 2024) dalam studi komparatifnya menemukan bahwa korupsi memiliki dampak negatif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, dengan Indonesia menunjukkan pola yang konsisten dengan temuan tersebut. Hasil penelitian ini diperkuat oleh kajian (Hasibuan et al., 2025) yang menggunakan data periode 2019-2024.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kepustakaan (library research). Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis secara mendalam fenomena korupsi serta dampaknya terhadap pembangunan ekonomi di Indonesia berdasarkan berbagai sumber literatur dan data sekunder yang relevan. Metode studi kepustakaan digunakan karena penelitian tidak melakukan pengumpulan data lapangan secara langsung, melainkan memanfaatkan berbagai referensi ilmiah sebagai sumber utama dalam memperoleh data dan informasi penelitian. Sumber data dalam penelitian ini berasal dari data sekunder berupa jurnal ilmiah nasional dan internasional, artikel akademik, laporan lembaga pemerintah dan lembaga internasional, buku, serta dokumen pendukung lain yang berkaitan dengan korupsi dan pembangunan ekonomi. Data juga diperoleh dari publikasi resmi lembaga seperti Badan Pusat Statistik (BPS), Transparency International, World Bank, dan Indonesia Corruption Watch (ICW). Pemilihan sumber tersebut dilakukan karena memiliki keterkaitan langsung dengan pembahasan penelitian serta dinilai memiliki tingkat validitas dan kredibilitas yang tinggi.

Proses pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi dengan menelusuri berbagai literatur melalui Google Scholar, SINTA, repositori perguruan tinggi, dan publikasi resmi lembaga terkait. Literatur yang digunakan dipilih berdasarkan

beberapa kriteria, yaitu memiliki relevansi dengan tema penelitian, memuat pembahasan mengenai dampak korupsi terhadap sektor ekonomi, serta diterbitkan dalam rentang waktu yang masih relevan agar data yang digunakan tetap aktual. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan beberapa hasil penelitian terdahulu sebagai bahan perbandingan untuk memperkuat analisis.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis isi (content analysis). Analisis dilakukan dengan cara membaca, memahami, mengidentifikasi, dan mengelompokkan berbagai informasi yang diperoleh dari sumber-sumber literatur. Selanjutnya, data dianalisis berdasarkan beberapa aspek utama, seperti dampak korupsi terhadap pertumbuhan ekonomi, investasi, ketimpangan sosial, pembangunan infrastruktur, kualitas pelayanan publik, dan stabilitas ekonomi nasional. Hasil dari berbagai literatur kemudian dibandingkan dan disintesis untuk menemukan pola serta hubungan yang menunjukkan pengaruh korupsi terhadap pembangunan ekonomi di Indonesia. Melalui metode penelitian ini, penulis berupaya memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dampak korupsi terhadap pembangunan ekonomi Indonesia serta memberikan gambaran mengenai pentingnya upaya pemberantasan korupsi dalam mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dampak Korupsi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Temuan penelitian secara konsisten menunjukkan bahwa korupsi memberikan dampak negatif yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. dalam kajiannya (Hasibuan et al., 2025) menemukan bahwa setiap penurunan satu poin dalam Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia berkorelasi dengan perlambatan laju pertumbuhan PDB riil. Mekanisme transmisi utama terjadi melalui penurunan produktivitas belanja publik, di mana anggaran yang seharusnya digunakan untuk pembangunan justru bocor ke kantong-kantong koruptor. (Cintana et al., 2025) dalam kajiannya menemukan bahwa korupsi memiliki dampak negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dengan nilai koefisien yang substansial. Penelitian ini juga menemukan efek lag, di mana dampak korupsi terhadap pertumbuhan ekonomi tidak hanya terjadi secara langsung pada periode berjalan, tetapi juga berlanjut pada periode-periode berikutnya melalui kerusakan kapasitas institusional yang bersifat kumulatif.

(Hasibuan et al., 2025) yang mengevaluasi periode 2019-2024 menemukan bahwa korupsi tidak hanya menghambat pertumbuhan PDB, tetapi juga berkontribusi pada tekanan inflasi melalui inefisiensi distribusi. Praktik korupsi dalam rantai distribusi barang dan jasa menciptakan biaya tambahan yang pada akhirnya dibebankan kepada konsumen dalam bentuk kenaikan harga. Kondisi ini secara ganda merugikan masyarakat: pertumbuhan ekonomi yang lebih lambat sekaligus daya beli yang terkikis oleh inflasi.

Dampak Korupsi Terhadap Iklim Investasi

Korupsi terbukti menjadi hambatan utama bagi masuknya investasi asing langsung (Foreign Direct Investment/FDI) ke Indonesia. (Hasibuan et al., 2025) menunjukkan bahwa korupsi meningkatkan biaya berbisnis di Indonesia secara tidak proporsional.

Investor asing yang mempertimbangkan untuk menanamkan modalnya di Indonesia dihadapkan pada ketidakpastian regulasi yang diperparah oleh praktik suap dan gratifikasi kepada aparaturnegara, sehingga mengurangi kepastian hukum dan prediktabilitas imbal hasil investasi. Dampak korupsi terhadap investasi juga dianalisis oleh (Islam et al., n.d.) dalam konteks stabilitas perbankan. Penelitian tersebut menemukan bahwa korupsi berpengaruh positif terhadap ketidakstabilan perbankan, yang pada gilirannya memengaruhi kemampuan sektor keuangan dalam mengintermediasi dana untuk kegiatan investasi produktif. Ketidakstabilan perbankan akibat korupsi menciptakan efek pengganda negatif terhadap iklim investasi keseluruhan. Pada level mikro, korupsi dalam perizinan dan pengadaan barang jasa pemerintah menciptakan hambatan masuk (entry barriers) yang tidak efisien. Perusahaan yang tidak bersedia membayar suap menghadapi kesulitan dalam mendapatkan izin usaha atau memenangkan kontrak pemerintah, sehingga menciptakan seleksi yang tidak berbasis kompetensi. Kondisi ini menurunkan kualitas investasi secara keseluruhan dan mendistorsi persaingan usaha yang sehat.

Dampak Korupsi Terhadap Ketimpangan Sosial dan Kemiskinan

(Cintana et al., 2025) menemukan bahwa korupsi memperparah ketimpangan sosial yang diukur dengan indeks Gini di Indonesia. Mekanismenya terjadi melalui dua jalur utama: pertama, korupsi dalam distribusi bantuan sosial mengakibatkan program pengentasan kemiskinan tidak tepat sasaran sehingga dana yang seharusnya diterima oleh masyarakat kurang mampu tidak sampai kepada mereka; kedua, korupsi menciptakan kondisi di mana distribusi kekayaan semakin terkonsentrasi pada segelintir elit yang memiliki akses ke jaringan kekuasaan. Kajian tentang hubungan korupsi dengan kemiskinan di Indonesia secara lebih spesifik dilakukan oleh (Islam et al., n.d.). Penelitian tersebut menemukan bahwa perbaikan tata kelola pemerintahan, yang merupakan antitesis dari korupsi, berpengaruh signifikan terhadap penurunan tingkat kemiskinan. Dengan kata lain, perbaikan tata kelola yang mereduksi korupsi secara langsung berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin. Korupsi dalam sektor pendidikan dan kesehatan memiliki dampak yang sangat merusak terhadap perkembangan modal manusia (human capital) (Azami, 2026). Dana pendidikan yang dikorupsi menghambat peningkatan kualitas sarana dan prasarana sekolah, terutama di daerah terpencil dan kurang berkembang. Di sektor kesehatan, korupsi dalam pengadaan obat-obatan dan alat kesehatan menurunkan kualitas layanan kesehatan publik sehingga berdampak negatif terhadap produktivitas tenaga kerja.

Dampak Korupsi Terhadap Pembangunan Infrastruktur

Korupsi dalam proyek infrastruktur memiliki implikasi yang sangat luas terhadap kapasitas produksi ekonomi jangka panjang. (Cintana et al., 2025) menunjukkan bahwa korupsi dalam pembangunan infrastruktur tidak hanya mengurangi kuantitas infrastruktur yang dibangun, tetapi juga menurunkan kualitasnya secara substansial. Mark-up anggaran yang dilakukan oleh kontraktor yang berkolusi dengan pejabat pengadaan mengakibatkan penggunaan material di bawah standar, sehingga infrastruktur yang dibangun cepat rusak dan tidak memberikan manfaat ekonomi yang optimal. Dampak jangka panjang dari korupsi infrastruktur adalah menurunnya konektivitas ekonomi antar wilayah. Jalan, jembatan, dan fasilitas logistik yang

berkualitas rendah akibat korupsi pengadaan meningkatkan biaya distribusi barang dan jasa, sehingga menurunkan daya saing produk-produk Indonesia di pasar domestik maupun internasional. Kondisi ini secara langsung menghambat pertumbuhan ekonomi daerah-daerah yang memiliki potensi ekonomi tinggi namun terisolasi akibat infrastruktur yang tidak memadai.

Upaya Pemberantasan Korupsi dan Dampaknya Terhadap Ekonomi

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa perbaikan tata kelola anti-korupsi secara konsisten berkorelasi positif dengan akselerasi pembangunan ekonomi (Agil & Munawar, 2026). Kajian yang dilakukan dalam konteks Indonesia pasca-reformasi menunjukkan bahwa penguatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan reformasi birokrasi berkontribusi pada perbaikan iklim investasi. Hal ini terbukti dari tren peningkatan skor IPK Indonesia dari 20 pada tahun 2001 menjadi 34 pada tahun 2023, meskipun capaian ini masih jauh dari ideal (Alif & Hazmi, 2024). Transparansi dalam pengelolaan anggaran negara terbukti efektif dalam mengurangi kebocoran fiskal akibat korupsi. Penerapan sistem e-procurement, e-budgeting, dan berbagai inovasi tata kelola digital yang transparan telah berhasil mereduksi peluang korupsi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Studi-studi empiris menunjukkan bahwa daerah-daerah yang menerapkan sistem transparansi anggaran yang lebih ketat cenderung memiliki kinerja pembangunan yang lebih baik dibandingkan daerah yang pengelolaan anggarannya masih bersifat tertutup. (Politik, 2022)

Kesimpulan dan Saran

Kajian ini menegaskan bahwa korupsi merupakan penghambat utama pembangunan ekonomi Indonesia yang bersifat sistemik dan multidimensional. Dampak negatif korupsi mencakup: (1) perlambatan laju pertumbuhan ekonomi melalui distorsi alokasi sumber daya fiskal; (2) deterensi investasi asing dan domestik akibat tingginya biaya transaksi dan ketidakpastian hukum; (3) memperburuk ketimpangan sosial dan menghambat program pengentasan kemiskinan; (4) menurunkan kualitas infrastruktur dan layanan publik yang menjadi fondasi produktivitas ekonomi; serta (5) mengancam stabilitas sistem perbankan sebagai motor penggerak perekonomian. Berdasarkan temuan kajian ini, beberapa rekomendasi kebijakan yang perlu dipertimbangkan adalah: pertama, penguatan kapasitas dan independensi lembaga pengawas antikorupsi terutama KPK (Agil & Munawar, 2026); kedua, akselerasi transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas; ketiga, reformasi sistem remunerasi aparatur sipil negara untuk mengurangi insentif melakukan korupsi; keempat, penguatan pendidikan antikorupsi berbasis nilai-nilai moral dan keagamaan yang dapat membangun integritas sejak dini; dan kelima, pemberdayaan masyarakat sipil dan media sebagai pilar pengawasan eksternal terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Pemberantasan korupsi bukan sekadar agenda hukum, melainkan merupakan prasyarat fundamental bagi tercapainya cita-cita pembangunan ekonomi Indonesia yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Dengan demikian, upaya pemberantasan korupsi harus diposisikan sebagai prioritas strategis nasional yang melibatkan seluruh elemen bangsa.

Daftar Pustaka

- Agil, F., & Munawar, A. (2026). Criminal Sanctions for Corruption in Islamic and Positive Legal Systems : A Comparative Study of Indonesia , Saudi Arabia , and. 4(01), 1–24 https://repository.uin-malang.ac.id/26756/?utm_source.
- Alif, R., & Hazmi, A. (2024). Pengaruh Korupsi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. 3, 85–92.
- Azami, M. K. (2026). Pancasila Sebagai Dasar Anti Korupsi. 4, 405–412.
- Cintana, D., Haidillah, A. S., Zulfa, S. A., Muhadi, A. A., & Khodijah, S. (2025). Dampak Korupsi terhadap Pembangunan Ekonomi Nasional. 1, 12–18.
- Dipa, N. (2022). No Title. Nip 1969030819999031002. https://repository.uin-malang.ac.id/13574/?utm_source
- Hasibuan, R. K., Septiawati, M., Bellia, A. B., Putri, A., Cahyani, I., & Maharani, A. P. (2025). Dampak Korupsi terhadap Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. 9865, 1–10.
- Islam, U., Maulana, N., Ibrahim, M., Indonesia, M., Author, C., Universitas, L., Negeri, I., Malik, M., Malang, I., & Studies, I. (n.d.). : https://repository.uin-malang.ac.id/17805/?utm_source
- Politik, P. (2022). Jurnal Penelitian Hukum Indonesia - JPeHI (VOL 3, No 02 2022) 40. 3(02), 40–59.